

BAB V

KESIMPULAN

Mesir merupakan negara merdeka yang belum memiliki kedaulatan, ketika pada masa Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat, sistem pemerintahan Mesir terletak pada satu kekuasaan yaitu ditangan Eksekutif dan masa jabatan presiden tidak terbatas. Namun setelah wafatnya Anwar Sadat, Husni Mubarak menjadi presiden Mesir dengan melalui proses pemilu, dan itulah pertama kalinya Mesir melakukan pemilihan presiden secara demokrasi.

Demokrasi di Mesir dapat ditandai dengan adanya pemilu, kebebasan pers yang tidak dibatasi dalam penyiarannya, perubahan konstitusi tentang multi partai dan pembebasan para oposisi gerakan pro demokrasi Mesir. Akan tetapi Mesir membutuhkan demokrasi liberal, sebuah sistem politik yang tidak hanya ditandai oleh pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga penegakan undang-undang, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan terhadap kebebasan dasariah; berbicara, berkumpul, beragama dan hak milik pribadi. Bundel kebebasan ini disebut sebagai liberalisme konstitusional (constitutional liberalism).

Terjadinya demokrasi Mesir tersebut tidak luput karena kedatangan bangsa Barat terutama Amerika yang selalu mendorong Mubarak untuk melakukan demokrasi modern dan berusaha memberikan bantuan baik dari segi politik, ekonomi

dan militer. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan telah terjadi perubahan

antara dua negara yaitu Amerika dan Mesir. Tolak ukur terhadap Modern di Mesir dapat diketahui yaitu melalui modernisasi terhadap demokrasi yang ada di Mesir, sehingga pada 7 September 2005, Mesir pertamakalinya menjalankan demokrasi modern yaitu dengan banyak calon (multi partai)